

**NORMALISASI HUBUNGAN ISRAEL DENGAN NEGARA-NEGARA ARAB TERHADAP
KEBERLANGSUNGAN KONFLIK ISRAEL PALESTINA**

MAKALAH

Diajukan untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester

Mata Kuliah Lembaga-lembaga Internasional

Dosen Pengampu : Dr.H. Ija Suntana, M.Ag



Oleh :

Sailan Holilul Azfa

NIM : 1193030086

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga makalah ini bisa selesai pada waktunya. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Pangandaran, 3 Juli 2022

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu konflik Internasional yang menyita perhatian dunia yaitu konflik Israel dengan Palestina. Palestina merupakan satu-satunya negara yang mengikuti Konferensi Asia-Afrika Tahun 1955 yang belum mendapatkan kemerdekaannya sampai sekarang. Karena penjajahan Israel terhadap Palestina masih saja tetap berlangsung hingga hari ini.

Dalam usahanya Palestina telah melakukan berbagai hubungan bilateral dengan negara lain dalam rangka mencari dukungan dan pengakuan dari berbagai negara, termasuk kepada beberapa negara di Eropa. Dan hasilnya yaitu pada forum multilateral PBB, Palestina resmi disahkan sebagai *non-member observer state* pada tahun 2012. Hal tersebut merupakan langkah awal bagi Palestina dalam menunjukkan eksistensinya dan ikut dalam forum-forum internasional lainnya.

Namun tidak dapat dipungkiri, konflik Israel dan Palestina ini sangatlah *alot*. Kedua negara tersebut tetap bersikeras ingin memperebutkan satu daerah yang sama sebagai wilayah mereka. Terlepas dari latar belakang alasan mereka dalam perebutan wilayah, apakah atas dasar agama ataupun politik.

Di tengah konflik yang sedang terjadi sejak lama dan belum kunjung reda antara Israel dan Palestina, Israel mencoba membangun kembali komunikasi dengan melakukan normalisasi komunikasi dengan Negara-negara Arab dibantu oleh Amerika Serikat pada masa Donal Trump. Dan hal tersebut menimbulkan pro-kontra dari berbagai negara di belahan dunia. Dan dapat berdampak pada kegagalan untuk menemukan "*two state solution*".

B. Rumusan Masala

Bagaimana normalisasi hubungan israel dengan negara-negara arab terhadap keberlangsungan konflik israel palestina?

C. Tujuan Makalah

Guna mengetahui normalisasi hubungan israel dengan negara-negara arab terhadap keberlangsungan konflik israel palestina

BAB II PEMBAHASAN

Dunia Internasional sampai saat ini memanglah sedang terus menerus mendukung adanya suatu solusi damai antara Palestina dan Israel yaitu melalui konsep “*two state solution*” yang telah disepakati oleh dunia internasional dan juga telah dimandatkan dalam berbagai resolusi Majelis Umum PBB.

Namun berbagai tantangan semakin menghadang perjalanan perdamaian antara Palestina dan Israel tersebut. Sampai saat ini Israel masih saja gencar terus menerus mengambil alih wilayah Palastina dengan melakukan penggusuran terhadap rumah warga sekalipun tindakan itu adalah ilegal dan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.¹ Dan tindakan itu termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan yang masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Disamping itu, Israel juga gencar melakukan upaya jalur diplomatik yaitu normalisasi hubungan terhadap negara-negara di Daerah Arab. Adanya normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Israel dengan negara-negara Arab yang kemudian ditengahi oleh Amerika Serikat telah menciptakan gelombang Pro-Kontra yang dahsyat di antara negara-negara dan berbagai pihak seantero dunia.

Setelah sebelumnya Amerika Serikat yang dikenal ikut aktif dalam proses perdamaian konflik Palestina-Israel, tetapi kemudian pada masa pemerintahan Donald Trump Amerika tidak lagi bertindak sebagai pihak yang aktif dalam solusi damai. Hal demikian dapat dilihat ketika kemudian AS secara unilateral pada tanggal 6 Desember 2017 telah mengumumkan keputusannya untuk mengakui Jerusalem sebagai Ibu kota Israel yang kemudian diikuti oleh pemindahan Kedutaan AS ke daerah Arnoa di Jerusalem Barat.

Dengan adanya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab akan mempersulit terciptanya “*two state solution*”. Dapat dilihat dari munculnya argumen-argumen pro-kontra terhadap normalisasi hubungan tersebut.

Adapun Negara-negara Arab yang terlibat dalam normalisasi hubungan dengan negara Israel diantaranya yaitu dimulai dari Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan. Negara-negara tersebut tentu mempunyai alasan tersendiri mengapa memilih untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Israel.

Tetapi yang dapat disimpulkan bahwa terlepas motif dari masing-masing negara melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, negara-negara tersebut melihat ada Amerika Serikat yang berdiri di Israel. Seperti Uni Emirat Arab sebagai negara Arab yang

¹https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina

perama kali melakukan diplomasi dengan Israel dalam bidang keamanan dan teknologi, Bahrain yang melakukan diplomasi dengan Israel dengan motif membeli jaminan keamanan dari negara Iran. Sudan melakukan diplomasi dengan Israel guna keluar dari daftar hitam AS sebagai negara pendukung teroris dan memperlancar transaksi dagang secara global.

Melihat fenomena tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa negara-negara Arab yang melakukan diplomasi dengan Israel adalah mereka yang ingin kepentingannya mendapat jaminan dari Amerika Serikat. Mengutip dari jurnal *Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism*, dikatakan "From several existing causes, there are five predominant causes of such hostility: regional political tension; weak government; organized crimes and anti-secularism; economic gaps; and media restriction." ² bahwa salah satu terjadinya krisis multidimensi yaitu adanya pemerintah sipil yang lemah, lemah disini bisa berarti bisa lemah dalam segi politik, ekonomi, dan segi pertahanan. Jika dikaitkan dengan konflik Palestina-Israel mengenai sebagian negara Arab yang menerima terhadap normalisasi hubungan diplomatic dengan Israel disamping adanya kepentingan juga ada kelemahan tertentu atas Amerika, dengan kata lain Amerika berkuasa atas negara tersebut baik segi politik, ekonomi ataupun militer.

Seperti halnya negara Bahrain yang mayoritas muslim sunni yang senantiasa melakukan diplomasi dengan Israel karena merasa terancam oleh negara Iran. Dengan dilakukannya diplomasi dengan Israel disertai dukungan Amerika maka Bahrain mendapatkan jaminan dari Amerika atas Iran dan menganggap bahwa Iran adalah musuh bersama.

Selanjutnya yaitu Sudan yang melakukan diplomasi dengan Israel karena ingin keluar dari *black list* yang dilakukan Amerika terhadapnya yang menyebabkan Sudan sulit untuk melakukan transaksi secara global karena ditandai sebagai negara pendukung terorisme.

Melihat kasus diatas, sah-sah saja hubungan diplomasi antara negara-negara tersebut dengan Israel karena dalam norma hubungan Internasional, adanya diplomasi adalah guna kepentingan masing-masing negara. Namun dalam doktrin Islam, terdapat dua paradigma tentang hubungan Internasional yaitu paradigma idealisme dan paradigma ekspansionisme. Dikatakan bahwa "Expansionist paradigm is a paradigm which states that Islam is very concerned to the establishment of world Muslim society and not tolerate non –

² Ija Suntana dan Betty Tresnawaty, "Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism", *Journal Culture and Values in Education*, Volume 4 Edisi 2, 202, 1.

Muslim. The nature of international relation is competitive , conflict and power balance”.³ Sedangkan “Idealist paradigm is normative . This paradigm idealizes what should to be , the functioning of moral and law as well as aspires to form a world government . The paradigm wishes the existing countries / states to cooperate among themselves in various international organizations for global objectives and humanitarian”.⁴

Paradigma Idealisme mengatakan bahwa negara-negara yang ada di dunia dapat bekerja sama membentuk organisasi internasional untuk tujuan global dan kemanusiaan. Sedangkan paradigm ekspansionisme menyatakan bahwa Islam sangat peduli terhadap masyarakat muslim dunia dan tidak mentolerir non muslim. Sehingga hubungan internasional yang terjadi adalah konflik, persaingan dan kekuasaan. Maka negara islam dan negara non muslim bisa dikatakan bermusuhan dan tidak boleh adanya hubungan diplomasi apapun.

Berdasarkan kedua paradigma tersebut, kemudian munculah pro kontra dari kalangan umat di dunia mengenai normalisasi hubungan negara-negara arab dengan Israel. Diantaranya tanggapan yang Pro yaitu :

1. Presiden Mesir menyatakan bahwa tindakan hubungan diplomasi tersebut sebagai upaya untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas kawasan.
2. Antonio Gutters, Sekretaris Jendral PBB menyatakan bahwa normalisasi hubungan sebagai upaya untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

Adapun tanggapan kontra diantaranya yaitu :

1. Hossein Amir Abdollahian, pensihat senior jurubicara parlemen Iran menyatakan bahwa Pendekatan baru UEA untuk menormalkan hubungan dengan Israel yang palsu dan kriminal tidak menjaga perdamaian dan keamanan, tetapi melayani kejahatan Zionis yang sedang berlangsung dan berbalik pada perjuangan Palestina. Dengan kesalahan strategis itu, UEA akan dilanda dalam api Zionisme.
2. Mohammed al-Hadrami, menteri luar negeri Yaman menyatakan Posisi Republik Yaman akan tetap konsisten dan tidak akan berubah terkait perjuangan Palestina dan hak-hak persaudarannya yang tidak dapat dicabut, yaitu pembentukan negara merdeka dengan Al Quds Al Sharif sebagai ibukotanya.

³ Ija Suntana dan Mahmud, “*Internnational Relation Paradigm: A Perspective of Islamic political science*”, Medwell Journals, The Social Science 13 (4), 2018, 859.

⁴ Ibid., 860.

BAB III

KESIMPULAN

Adanya normalisasi hubungan diplomatic yang dilakukan oleh beberapa negara Arab dengan Israel menimbulkan pro kontra diantara negara-negara dan berbagai pihak di belahan dunia. Menurut yang menyetujui adanya diplomasi tersebut adalah guna menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan timur tengah. Sedangkan menurut pendapat yang tidak menyetujui adanya diplomasi tersebut adalah karena hanya akan memperlancar penjajahan kaum zionis terhadap Palestina dan memperlambat adanya konsep perdamaian *two state solution*.

REFERENSI

<https://dunia.rmol.id/read/2020/08/14/447976/pro-kontra-normalisasi-hubungan-israel-uea-hamas-menusuk-rakyat-palestina-dari-belakang>

https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina

Ija Suntana dan Betty Tresnawaty. (2021) *Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism*. Journal Culture and Values in Education. Volume 4, Edisi 2.

Ija Suntana dan Mahmud. (2018) *Internnational Relation Paradigm: A Perspective of Islamic political science*. Medwell Journals. The Social Science 13 (4)